SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2004

PENINGKATAN PERTAHANAN MARITIM DAN MODERNISASI ALUTSISTA FILIPINA MELALUI KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2022-2025

Strengthening the Philippines' Maritime Defense and Modernizing Its Defense Equipment Through a Strategic Partnership with Australia, 2022–2025

Desy Natalia Dorkas Fawan

Hubungan Internasional
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

*email: desyfawan22@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini menganalisis upaya peningkatan pertahanan maritim Filipina melalui kemitraan strategis dengan Australia pada periode 2022-2025. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kemitraan tersebut terhadap kapabilitas maritim Manila, dengan fokus pada program *Joint Australian Training Team-Philippines* (JATT-P). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka dari dokumen perjanjian dan pernyataan resmi pemerintah, penelitian ini mengidentifikasi peningkatan interoperabilitas lintas matra Angkatan Bersenjata Filipina sebagai hasil konkrit dari kerja sama yang disepakati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan strategis ini memberikan dampak signifikan melalui pelatihan taktis, modernisasi alutsista, dan pelaksanaan patroli gabungan sebagai instrument daya tangkal (*deterrence*). Meskipun Filipina masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kapasitas militer dengan Tiongkok serta hambatan struktural anggaran domestik, kolaborasi ini terbukti memperkuat arsitektur keamanan maritim dan mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang terbuka serta tangguh.

Kata Kunci:
Pertahanan Maritim, Filipina, Australia, JATT-P, Strategi Lindungi Laut (Hedging), Laut Filipina Barat.

Keywords:
Maritime Defense, Philippines, Australia, JATT-P, Hedging Strategy, West Philippine Sea.

Abstract

This study analyzes efforts to enhance the Philippines' maritime defense through a strategic partnership with Australia during the 2022–2025 period. The study aims to evaluate the impact of this partnership on Manila's maritime capabilities, with a focus on the Joint Australian Training Team-Philippines (JATT-P) program. Using a qualitative research method with a literature review of treaty documents and official government statements, this study identifies improved cross-service interoperability within the Philippine Armed Forces as a concrete result of the agreed cooperation. The findings indicate that this strategic partnership has had a significant impact through tactical training, military equipment modernization, and the conduct of joint patrols as instruments of deterrence. Although the Philippines still faces challenges in the form of a military capability gap with China and structural constraints in its domestic budget, this collaboration has proven to strengthen the maritime security architecture and support an open and resilient Indo-Pacific region.

Submit Tgl.: 09-Juni-2026	Diterima Tgl.: 12-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 18-Juni-2026

PENDAHULUAN

Laut Filipina Barat merupakan bagian dari wilayah maritim Filipina yang berada di sebelah barat Manila yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Pasca-ketegangan di Scarborough Shoal pada tahun 2012, pemerintah Presiden Aquino III secara resmi menamakan kawasan tersebut sebagai Laut Filipina Barat untuk mempertegas hak berdaulat mereka di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai insiden, termasuk penghadangan terhadap misi pasokan dan pengawasan maritim Filipina di Scarborough Shoal (Bajo de Masinloc) oleh penjaga pantai Tiongkok, yang dinilai telah mengganggu hak berdaulat maritim mereka (Batongbacal, 2015).

Pemerintahan Filipina di bawah pimpinan Presiden Benigno S. Aquino III, berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, secara tegas menamakan wilayah laut di sisi barat kepulauan mereka sebagai Laut Filipina Barat. Wilayah ini mencakup Laut Luzon serta perairan di sekitar, di dalam, maupun yang berbatasan dengan Kawasan Pulau Kalayaan dan Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal). Penetapan ini juga menegaskan hak Filipina atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut berdasarkan UNCLOS, guna mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, serta mengelola sumber daya alam di wilayah maritimnya (Philippines, 2012).

Pada tanggal 22 Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase terhadap Tiongkok berdasarkan Lampiran VII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Gugatan tersebut menyangkut klaim hak historis Tiongkok, status hukum fitur-fitur maritim beserta zona perairannya, serta legalitas tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang dianggap Filipina melanggar Konvensi. Proses ini dijalankan oleh Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) yang bertindak sebagai Panitera, meskipun pemerintah Tiongkok memutuskan untuk tidak menerima maupuan berpartisipasi dalam persidangan tersebut (Permanent Court of Arbitration, n.d.). Inti dari sengketa ini adalah kebijakan *nine-dash line* yang dibuat oleh Tiongkok atas klaimnya yang mencakup sekitar 90% wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan (termasuk sebagian dari yuridiksi Laut Filipina Barat). Ketegangan di wilayah tersebut dimulai sejak tahun 2009, ketika Tiongkok terus meningkatkan upayanya untuk memperkuat posisinya di Laut Tiongkok Selatan melalui berbagai taktik termasuk penggunaan kekuatan militer, penjaga pantai, dan pengerahan milisi maritim untuk mengganggu kapal asing. Tiongkok juga berupaya untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya minyak dan gas di wilayah sengketa. Selain itu, pada tahun 2013, mereka mulai membangun pulau-pulau buatan serta mendirikan aset militer dan sipil di sana (Asia Maritime Transparency Initiative, 2023). Mengingat posisi ekonomi dan militernya yang lebih lemah dibandingkan Tiongkok, Filipina memilih jalur arbitrase sebagai penyelesaian sengketa melalui hukum internasional. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang dibuat berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), terkait kasus yang diajukan oleh Filipina mengenai klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Putusan tersebut secara mutlak mendukung posisi Filipina di wilayah perairan tersebut, dan menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas hak historis dan sumber daya menurut *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum (Campbell & Salidjanova, 2016).

Scarborough Shoal merupakan salah satu wilayah strategis yang sering menjadi sengketa antara Filipina dan Tiongkok, wilayah ini merupakan sebuah atol atau karang yang berbentuk cincin. Letaknya sekitar 220 km (sekitar 120 mil laut) sebelah barat Luzon, pulau utama Filipina, dan lebih dari 800 km (sekitar 430 mil laut) sebelah tenggara Hong Kong. Filipina menegaskan bahwa Scarborough Shoal terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka sesuai dengan hukum internasional. Berdasarkan aturan tersebut, suatu negera memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut (370) dari garis pantainya. Atol ini memiliki nilai strategis tinggi karena menguasai jalur pelayaran utama serta memiliki kawasan perikanan yang kaya dan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi ketahanan pangan regional. Ketegangan maritim dan diplomatik yang terus-menerus antara Filipina dan Tiongkok telah membuat atol tersebut menjadi titik rawan sengit (Britannica, 2026).

Perselisihan wilayah maritim yang intens antara Filipina dan Tiongkok juga terjadi di Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly, yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Pada tahun 1999, Filipina sengaja mengandaskan sebuah kapal perang di wilayah tersebut untuk memperkuat klaimnya atas wilayah yang disebutnya Laut Filipina Barat. Sejak saat itu, Angkatan Bersenjata Filipina dengan dukungan Penjaga Pantai secara rutin melakukan misi pengiriman pasokan bagi personel militer yang bertugas di kapal perang tersebut, yang dikenal sebagai BRP Sierra Madre. Dalam upayanya melakukan misi pengiriman pasokan, militer Filipina sering terkendala karena dihadang oleh kapal penjaga

pantai Tiongkok yang memicu konfrontasi. Insiden tabrakan menjadi semakin sering terjadi, disertai penggunaan laser kelas militer dan penembakan meriam air secara berulang terhadap kapal-kapal Filipina. Selain itu, para nelayan Filipina pun kerap menerima tindakan agresif saat beraktivitas di kawasan tersebut (Council on Foreign Relations, 2024).

Ketegangan kedua negara di Second Thomas Shoal berpusat pada klaim kedaulatan dan legalitas yang saling bertentangan. Tiongkok tetap mempertahankan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly, termasuk Second Thomas Shoal. Klaim Tiongkok sejalan dengan tujuannya untuk menjaga wilayah tersebut tetap tidak berpenghuni, sehingga pengandasan kapal BRP Sierra Madre di kawasan tersebut dianggap Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Filipina membalas dengan menegaskan bahwa pengandasan BRP Sierra Madre pada tahun 1999 dilakukan sebelum adanya kesepakatan DOC pada tahun 2002, dan bahwa keberadaan kapal tersebut merupakan langkah pertahanan sah di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka yang telah diakui oleh putusan arbitrase 2016. Tiongkok menganggap masalah di Second Thomas Shoal pada dasarnya adalah tentang kedaulatan teritorial, namun bagi Filipina masalah ini adalah tentang menegakkan hak berdaulat di wilayah ZEE mereka. Perbedaan pandangan yang fundamental ini membuat kedua negara sulit mencapai konsensus permanen (Liu, 2026).

Filipina menghadapi eskalasi konflik dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, yang ditandai oleh serangkaian aksi provokatif pasukan penjaga pantai Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal. Rentetan insiden tersebut mendorong Filipina untuk segera memperkuat pertahanan militernya guna memitigasi segala bentuk tindakan agresif Tiongkok di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Menghadapi agresi maritim Tiongkok diperlukan kekuatan pertahanan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga mampu menjaga stabilitas kawasan secara berkelanjutan. Orientasi pertahanan Filipina kini difokuskan pada penguatan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia, serta perluasan latihan militer gabungan baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, Manila tengah mengakselerasi modernisasi alutsista melalui program Re-Horizon 3, yang menempatkan pengamanan Laut Filipina Barat sebagai prioritas nasional guna membentengi wilayah tersebut dari klaim sepihak *nine-dash line*. Filipina tengah menjalani pergeseran paradigma pertahanan paling signifikan dalam sejarah modernnya. Di bawah pemerintahan Marcos Jr., Filipina mengadopsi *Comprehensive Archipelagic Defense Concept* (CADC), strategi ini bertujuan untuk memproyeksikan kekuatan militer hingga ke batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) guna melindungi hak berdaulat dan kekayaan sumber daya alam di wilayah maritimnya.

Pemerintah Filipina menegaskan bahwa perlindungan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat bergantung pada penguatan pertahanan militer dan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra yang memiliki visi serupa dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Melalui program Re-Horizon 3, modernisasi alutsista diprioritaskan pada peningkatan kapabilitas angkatan laut dan angkatan udara guna menghadapi potensi eskalasi tindakan koersif dari Beijing. Selain itu, optimalisasi lokasi strategis di bawah kerangka perjanjian EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) dan pelaksanaan latihan gabungan tetap menjadi pilar utama dalam meningkatkan logistik pertahanan, meskipun berada di bawah tekanan diplomatik dan maritim Tiongkok.

Peningkatan pertahanan maritim Filipina didorong oleh dua faktor utama, yaitu eskalasi kehadiran Tiongkok di Laut Filipina Barat yang merambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta urgensi untuk melindungi hak berdaulat di Laut Filipina Barat. Aktivitas Tiongkok, yang mencakup serangkaian konfrontasi dan okupasi fitur maritim, dinilai sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas *status quo* di kawasan tersebut (R. C. De Castro, 2024). Tindakan provokatif terhadap kapal-kapal Filipina melalui berbagai taktik berbahaya seperti zona abu-abu (*grey zone tactics*), serta intensifikasi aktivitas Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, dan wilayah ZEE lainnya, telah menimbulkan urgensi keamanan yang mendesak. Mengingat adanya ketimpangan kapabilitas militer yang

signifikan antara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dengan kekuatan maritim Tiongkok, kesenjangan ini menjadi katalisator utama bagi pemerintah Filipina untuk mengakselerasi modernisasi sistem pertahanannya (R. C. De Castro, 2025). Urgensi peningkatan sistem pertahanan maritim juga dipicu oleh keterbatasan sumber daya dan proses modernisasi alutsista yang berjalan lambat di masa lalu. Manila terus berupaya membangun daya tangkal (*deterrence*) melalui penguatan kemitraan strategis dengan AS, Jepang, dan Australia guna mengimbangi kekuatan Tiongkok. Filipina tetap berkomitmen untuk mempertahankan hak berdaulat atas Laut Filipina Barat dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan putusan arbitrase tahun 2016.

Filipina memiliki hubungan diplomatik historis dengan Amerika Serikat (AS) yang menjadi fondasi utama pertahanan maritim Manila dalam menghadapi konflik di Laut Filipina Barat. Di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama (*Mutual Defense Treaty*), kedua negara mengimplementasikan berbagai program strategis seperti latihan militer bersama, penguatan kapasitas Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), pengawasan kawasan, hingga transfer teknologi. Selain dengan AS, Filipina juga mempererat kemitraan dengan Jepang dan Australia, mengingat signifikansi jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut. Meskipun AS dan Jepang merupakan mitra krusial, penelitian ini berfokus pada kemitraan strategis Filipina-Australia karena Australia merupakan mitra keamanan maritim utama kedua setelah AS dalam Strategi Pertahanan Nasional Filipina. Kerja sama keduanya mencakup interoperabilitas, *Maritime Domain Awareness* (MDA) serta bantuan kemanusiaan dan penganggulangan bencana (HADR). Sejak peningkatan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis pada tahun 2023, kedua negara berkomitmen melalui patroli gabungan guna memastikan penyelesaian sengketa secara damai tanpa paksaan.

Sejauh ini, masih terbatas literatur yang secara sistematis mengkaji hubungan politik dan keamanan Australia-Filipina, di mana kajian yang tersedia umumnya menggunakan perspektif Australia daripada lensa pertahanan maritim Filipina dalam menghadapi Tiongkok. kondisi inilah yang menyebabkan kemitraan strategis kedua negara jarang dibahas dibandingkan kerja sama Filipina dengan AS atau Jepang. Meskipun studi terdahulu kerap menempatkan Australia sekadar sebagai mitra pendukung penyeimbang eksternal Filipina di bawah kerangka aliansi AS, jarang ditemukan kajian yang membedah hubungan bilateral ini sebagai kemitraan strategis mandiri dalam memperkuat pertahanan maritim di Laut Filipina Barat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kemitraan strategis Filipina-Australia dalam memperkuat pertahanan maritim Manila, khususnya melalui program *Joint Australian Training Team-Philippine*s (JATT-P). Sebagai bagian dari *Enhanced Defense Cooperation Program* (EDCP), JATT-P berfungsi membangun kapasitas Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dengan mengerahkan *Mobile Training Teams* (MTT) Australia guna meningkatkan interoperabilitas di berbagai bidang krusial, seperti analisis intelijen, teknik tempur, dan ketahanan maritim. Kolaborasi ini memberikan kontribusi terhadap arsitektur keamanan baru di kawasan. Dengan mengintensifkan latihan bersama dan patroli udara-laut, kemitraan ini bertujuan meningkatkan kemampuan operasional maritim tanpa memicu provokasi langsung, sekaligus menjadi solusi konkret bagi stabilitas regional yang dapat direplikasi oleh negara-negara lain dalam menghadapi tantangan geopolitik di Indo-Pasifik.

KERANGKA ANALISIS

Kekuatan maritim adalah kemampuan terintegrasi suatu negara untuk mengelola dan memproyeksikan pengaruh di wilayah laut guna mengamankan kepantingan nasional (Antonopoulos, 2020). Bagi negara besar seperti AS dan Jepang, laut berfungsi sebagai pertahanan utama, arteri perdagangan global, dan instrumen diplomasi militer (Tierney John, 2022).

Secara luas, konsep ini tidak hanya mencakup supremasi angkatan laut, tetapi juga kemauan politik dalam mengeksploitasi sumber daya laut serta menjamin keamanan meritim melalui tata kelola yang stabil (Vargas-Suárez et al., 2021).

Bagi negara kepulauan, kekuatan maritim menjadi fondasi geopolitik untuk mengendalikan jalur navigasi dan melindungi kedaulatan wilayah. Hal ini mencakup kapasitas penegakan hukum yang memadai serta pemanfaatan posisi strategis untuk memengaruhi dinamika kawasan. Dengan demikian, penguasaan maritim bukan sekedar pilihan militer, melainkan integrasi antara kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan dalam menjaga keberlangsungan negara (Vargas-Suárez et al., 2021).

Kekuatan maritim merupakan instrumen krusial pertahanan nasional, terutama di Laut Filipina Barat yang menjadi titik ketegangan antara Filipina dan Tiongkok. Selain sebagai jalur perdagangan internasional, kawasan ini menyimpan cadangan minyak dan gas besar yang belum dieksplorasi karena faktor kedalaman laut. Melimpahnya sumber daya perikanan juga memicu gesekan antara nelayan lokal dan penjaga pantai kedua negara. Konflik maritim antara Filipina dengan Tiongkok memicu intervensi AS, mengubah wilayah tersebut menjadi arena persaingan kekuatan global. Fenomena ini membuktikan bahwa dominasi armada, teknologi militer dan sekutu di laut menjadi penentu hasil konflik.

Kawasan Laut Filipina Barat, khususnya di Kepulauan Spratly, Recto Bank (Reed Bank), Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal) menyimpan kekayaan sumber daya alam yang menjadikannya target perebutan akibat klaim *nine-dash line* Tiongkok. Bagi Manila, pengamanan wilayah maritim dan ZEE termasuk aset krusial seperti ladang gas Malampaya serta zona perikanan vital - adalah prioritas utama. Namun, upaya mengintegrasikan keamanan maritim masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan pasukan penjaga pantainnya (AZARI et al., 2023).

Agresi militer Tiongkok di Laut Filipina Barat semakin intens melalui berbagai tindakan provokatif yang melibatkan angkatan laut, penjaga pantai, hingga milisi maritim. Baru-baru ini, Beijing melakukan penghalangan aktivitas Filipina di dalam ZEE-nya dengan memasang barikade terapung di Scarborough Shoal, melakukan manuver berbahaya, serta menggunakan meriam air terhadap kapal patroli Manila. Serangkaian aksi ini menunjukkan upaya Tiongkok untuk memaksakan "pendudukan efektif" secara sepihak di kawasan tersebut (Heriawan, 2022). Peningkatan kemampuan maritim Tiongkok telah menimbulkan dilema keamanan (*security dilemma*) Filipina terutama dalam memperkuat klaimnya di kawasan tersebut tanpa memicu konfrontasi terbuka (Stach, 2021a). Pada akhirnya tanpa kapasitas maritim yang kredibel, diplomasi Filipina di Laut Filipina Barat cenderung lemah. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan laut dan jaringan keamanan maritim menjadi kunci jangka panjang.

Teori *Sea Power* yang dicetuskan oleh Alfred Thayer Mahan menegaskan bahwa dominasi maritim adalah pilar utama kekuatan suatu negara. Menurut Mahan, penguasaan lautan (*command of the sea*) memberikan kendali penuh atas jalur perdagangan global, yang memungkinkan proyeksi kekuatan militer ke luar wilayah. Dalam konteks pertahanan, hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk menangkal ancaman melalui kehadiran armada laut yang superior (Mahan, 1890).

Mahan (1890), berpendapat bahwa kekuatan maritim tidak muncul secara instan, melainkan dipengaruhi oleh enam komponen utama: letak geografis, bentuk fisik pesisir, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter nasional, serta karakter pemerintah yang konsisten dalam membangun armada laut dalam skala besar. Mahan menegaskan bahwa supremasi laut hanya dapat dicapai melalui konsentrasi armada yang terpusat dan penguasaan basis laut yang kuat. Hal ini terbukti pada keberhasilan Inggris di abad ke-18, yang mendominasi samudra dengan menghancurkan armada lawan secara menentukan (*decisive battle*), kekuatan laut, kebijakan ekonomi, dan jaringan basis global, serta mengamankan jalur perdagangan dunia melalui jaringan pangkalan strategis (Rodger, 1998). Namun, sebaliknya dispersi atau pemencaran kekuatan laut dinilai sebagai kegagalan strategis yang dapat melemahkan pengaruh nasional di kancah global.

Mahan (1890), membedakan *sea power* dan *land power* dengan mendefinisikan laut sebagai "jalan raya utama" (*great highway*) perdagangan dunia yang harus dikuasai guna memutus jalur komunikasi musuh. Strategi ini menekankan operasi ofensif melalui keterlibatan armada tempur (*battle fleet engagement*) daripada sekedar pertahanan pasif. Dalam pemikiran Mahan, *sea power* merupakan integritas holistik antara armada niaga sebagai penggerak ekonomi, angkatan laut sebagai pelindung supremasi, serta basis luar negeri sebagai pendukung logistik. Ia berargumen bahwa kekuatan laut bukan sekedar instrumen militer, melainkan faktor penentu sejarah yang mampu melumpuhkan lawan secara total melalui sinergi ekonomi, militer, dan geopolitik.

Penerapan *sea power* mengenai konsentrasi kekuatan ofensif untuk mendominasi lautan menemukan relevansinya dalam bentuk kemitraan strategis sebagai koalisi penyeimbang (*balancing coalition*). Di tengah ambisi Tiongkok yang berusaha menguasai 90% wilayah Laut China Selatan melalui klaim *nine-dash line*, Filipina dan Australia berupaya menciptakan kekuatan laut gabungan guna menghadapi dominasi tersebut. Sinergi ini diwujudkan melalui kerangka hukum *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan pelaksanaan patrol bersama yang secara efektif memperkuat elemen strategis posisi geografis dan konfigurasi wilayah maritim. Kemitraan bilateral ini berfungsi sebagai perluasan armada (*extended fleet*) yang bertujuan melindungi jalur perdagangan, serta menghambat penguasaan laut sepihak oleh Tiongkok (*denial of the sea control*).

Peningkatan pertahanan maritim Filipina didorong oleh sinergi antara program kerja sama strategis dan penguatan kapasitas operasional. Melalui instrumen seperti *Joint Australian Training Team-Philippines* (JATT-P), Filipina memperkuat kapabilitas *maritime sustainment* dan analisis intelijen dengan bantuan *Mobile Training Teams* dari Australia. Langkah ini diperkuat melalui latihan bersama ALON 2025, patroli gabungan di Laut Filipina Barat, serta modernisasi alutsista-termasuk integrasi sistem rudal Brahmos yang meningkatkan interoperabilitas melalui pertukaran pakar (*Subject Matter Experts*). Selain aspek teknis, JATT-P berperan krusial dalam membangun kepercayaan organisasional (*organizational trust*) yang memungkinkan kedua negara merespons secara taktis terhadap agresi penjaga pantai Tiongkok di wilayah strategis seperti Second Thomas Shoal.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis dampak kemitraan strategis Filipina-Australia dalam memperkuat interoperabilitas dan pertahanan maritim Manila, khususnya melalui program *Joint Australian Training Team-Philippines* (JATT-P) serta patroli bersama. Analisis dilakukan dengan menginterpretasi data sekunder dari laporan pemerintah, dokumen perjanjian internasional, dan artikel ilmiah terkait. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kerangka kebijakan seperti *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan *Enhanced Defence Cooperation Program* (EDCP) mengintegrasikan pertahanan maritim kedua negara di tengah dinamika Laut Tiongkok Selatan. Sinergi tersebut, tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis Angkatan Laut Filipina, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik-militer krusial dalam memperkokoh kedaulatan maritim Filipina di kawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manisfestasi Teori *Sea Power* Mahan dalam Dinamika Kemitraan Filipina-Australia

Teori *Sea Power* yang dikembangkan oleh Alfred T. Mahan (1890) memberikan kerangka teoretis relevan dalam membedah dinamika keamanan maritim Filipina. Inti teori ini menegaskan bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung pada kekuatan lautnya, yang diwujudkan melalui penguasaan ruang laut (*sea control*) dan kemampuan untuk membatasi akses lawan (*sea denial*). Konsep *command of the sea* ini menekankan bahwa pengendalian jalur pelayaran internasional

merupakan sumber keunggulan strategis yang memberikan pengaruh global bagi suatu negara. Mahan mengidentifikasi enam elemen utama *Sea Power*: letak geografis, karakteristik bentuk pantai, luas wilayah, karakter masyarakat, jumlah penduduk serta karakter pemerintahan (Mahan, 1890).

Insiden di *Second Thomas Shoal* dan *Scarborough Shoal* mempertegas relevansi teori *Sea Power*, di mana upaya Filipina mempertahankan kedaulatannya berbenturan langsung dengan strategi *sea denial* Tiongkok. Ketidakmampuan Manila dalam mengontrol penuh ruang lautnya menunjukkan urgensi penguatan interoperabilitas dengan mitra strategis seperti Australia. Manisfestasi enam elemen kekuatan laut Mahan, terwujud dalam kemitraan ini sebagai upaya mengatasi keterbatasan sumber daya nasional melalui *Maritime Cooperative Activity (MCA)*. Kemitraan strategis antara Filipina dan Australia merupakan hasil panjang hubungan pertahanan yang telah dibangun di atas fondasi kepercayaan dan komitmen bersama. Kerja sama ini berakar dari *Memorandum of Understanding on Defence Cooperation* tahun 1995 yang kemudian diperkuat secara signifikan melalui *Status of Visiting Forces Agreement* (SOVFA) di tahun 2007 (Andriyanto et al., 2024). Perjanjian ini sangat istimewa karena menjadikan Australia sebagai satu dari hanya dua negara di dunia yang memiliki status militer resmi dengan Filipina. Dukungan penuh Australia melalui peningkatan status menjadi kemitraan strategis pada akhirnya memperkuat posisi tawar Filipina dalam mengonsolidasikan kedaulatan maritim di kawasan.

Dalam teori *Sea Power*, Mahan menegaskan bahwa letak geografis adalah elemen fundamental yang menentukan potensi suatu negara untuk mendominasi laut. Negara dengan akses langsung ke jalur perdagangan global dan kemampuan proyeksi kekuatan di titik-titik strategis memiliki keuntungan kompetitif yang besar. Sebagai negara kepulauan, Filipina memiliki posisi geografis yang krusial karena wilayah Laut Filipina Barat merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang menjadi pusat jalur perdagangan internasional. Namun, klaim sepihak Tiongkok atas sebagian besar perairan tersebut menciptakan tantangan kedaulatan yang melampaui kapabilitas mandiri Manila (Gill, 2025). Tekanan geopolitik inilah yang mendorong Filipina memperkuat kekuatan maritimnya melalui kemitraan strategis dengan Australia, guna mewujudkan kawasan yang bebas, damai, dan patuh pada hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

Melalui kemitraan strategis dengan Australia, Filipina berupaya mengeskalasi nilai strategis geografisnya melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA). Inisiatif ini memungkinkan kedua negara melakukan patroli bersama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina sebagai langkah tegas untuk memperkuat kontrol efektif di tengah sengketa wilayah. Dukungan Australia dalam memproyeksikan kehadiran militer di jalur perdagangan Laut Filipina Barat selaras dengan prinsip Mahan bahwa kekuatan laut harus mampu melindungi kepentingan ekonomi global. Sinergi ini mengintegrasikan posisi Filipina ke dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang lebih luas, guna menyeimbangkan kekuatan regional terhadap tantangan pihak ketiga. Keterlibatan aktif Australia dalam latihan gabungan serta patroli maritim dan udara di dekat titik vital seperti *Scarborough Shoal* dan Kepulauan Spratly, membuktikan komitmen bersama untuk menjaga akses geografis yang bernilai strategis. Melalui sinergi ini, Filipina tidak lagi memandang letak geografisnya sebagai posisi yang terisolasi, melainkan sebagai pusat dari arsitektur keamanan maritim yang didukung oleh mitra strategis.

Keunggulan letak geografis Filipina didukung oleh elemen kedua dalam teori *Sea Power*, yaitu karakteristik bentuk pantai. Menurut Mahan (1890), garis pantai yang luas, dalam, dan dilengkapi pelabuhan alami yang strategis merupakan komponen mutlak untuk merangsang perdagangan maritim sekaligus mendukung pangkalan angkatan laut yang efektif. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kelima di dunia, Filipina menghadapi tantangan alami dalam mengelola dan mengawasi seluruh wilayah pesisirnya sacara mandiri (Catherine A. Courtney, 2000). Dalam kontes inilah, kemitraan strategis dengan Australia menjadi instrumen krusial bagi Manila untuk mengoptimalkan potensi fisik wilayahnya. Melalui penguatan *Maritime Domain Awareness* (MDA), Australia memberikan dukungan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pemantauan pesisir Manila (Brewster, 2018). Kehadiran teknologi pengawasan

modern ini memungkinkan Filipina mengatasi keterbatasan kapabilitas dalam mengintegrasikan wilayah pantainya terfragmentasi, sehingga pengawasan akses maritim menjadi lebih efektif. Selain itu, dukungan Australia dalam pengembangan kapasitas dan pemeliharaan armada kapal penjaga pantai Filipina sejalan dengan elemen *Sea PowerMahan (1890)*, bahwa kualitas infrastruktur dan logistik pendukung merupakan penentu utama jangkauan proyeksi kekuatan dari pangkalan-pangkalan pesisir.

Melalui mekanisme *Maritime Cooperative Activity* (MCA), kedua negara melakukan patroli bersama dengan melintasi berbagai titik strategis. Operasi ini membantu Filipina menegaskan kendali atas wilayah pesisirnya dengan menempatkan aset di area yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga meningkatkan efektivitas keamanan maritim. Kemitraan ini juga menitikberatkan pada pengembangan kapasitas SDM yang krusial untuk mengoperasikan aset di sepanjang garis pantai yang kompleks. Sinergi tersebut berupaya mentransformasi tantangan geografis berupa garis pantai yang sangat panjang menjadi keunggulan strategis melalui penguatan kemampuan deteksi, mobilitas armada, serta keberlanjutan pemeliharaan pangkalan di seluruh wilayah pesisir Filipina.

Dalam teori *Sea Power*(Mahan, 1890), luas wilayah diukur berdasarkan panjang garis pantai serta kemampuan mengendalikan akses ke perairan strategis tersebut. Ia berpendapat bahwa negara dengan wilayah memadai dan garis pantai yang mampu mendukung pangkalan laut yang tersebar luas memiliki daya jangkau lebih besar dalam melindungi kepentingan nasional serta jalur perdagangan. Bagi Filipina, tantangan utama dalam elemen ini adalah pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sangat luas di Laut Filipina Barat yang kerap bersinggungan dengan klaim tumpang tindih Tiongkok. Keterbatasan sumber daya nasional untuk mengawasi cakupan wilayah yang masif tersebut menjadikan kemitraan strategis dengan Australia sebagai kunci dalam memperluas jangkauan operasional Manila. Melalui mekanisme *Maritime Cooperative Activity* (MCA) dan latihan gabungan, Filipina mampu memproyeksikan kekuatannya melampaui kapasitas mandirinya, serta mempertegas kehadirannya di wilayah tersebut (Stach, 2021b). Efektivitas dalam mengelola luas wilayah diperkuat melalui pertukaran informasi dan intelijen, yang membantu Filipina mengintegrasikan pengawasan wilayahnya dari berbagai ancaman ilegal. Dengan dukungan Australia, Manila dapat menempatkan asetnya secara presisi di titik-titik krusial yang tersebar dalam wilayah maritimnya yang luas. Lebih jauh lagi, keterlibatan Australia dalam kerangka hukum internasional memberikan legitimasi diplomatik terhadap klaim Filipina di wilayah sengketa, sejalan dengan prinsip Mahan bahwa kontrol maritim sangat bergantung pada pengakuan hak untuk mengamankan jalur tersebut.

Karakter masyarakat merupakan determinan krusial dalam keberlanjutan kekuatan laut suatu bangsa, yang berakar pada kecenderungan nasional terhadap aktivitas maritim serta orientasi strategis pada ruang laut. Sebagai negara kepulauan dengan tradisi bahari yang panjang, Filipina memanfaatkan kemitraan strategis dengan Australia sebagai katalis untuk mentransformasi warisan laut tersebut ke dalam strategi pertahanan maritim modern yang lebih tangguh. Melalui intensitas pelatihan gabungan dan pertukaran personel dengan Angkatan Laut Australia, personel maritim Filipina seperti pasukan penjaga pantai Filipina kini mengadopsi standar profesionalisme serta disiplin internasional yang memperkuat kesiapan operasional di lapangan (Baylon & Santos, 2023). Penguatan karakter ini semakin tangguh seiring dengan publikasi luas mengenai keberhasilan kerja sama bilateral yang secara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat Filipina akan vitalnya perlindungan kedaulatan laut mereka. Dukungan masyarakat yang kian kuat terhadap kebijakan pemerintah tersebut menciptakan ekosistem nasional yang mendukung penuh penguatan kekuatan maritim. Di sisi lain, transfer pengetahuan teknis dan budaya organisasi modern dari Australia turut membentuk tenaga kerja maritim yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif dalam menghadapi dinamika keamanan yang kompleks.

Potensi kekuatan laut suatu bangsa sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas tenaga manusia yang mampu mengoperasikan sektor maritim, mulai dari awak kapal hingga personel pertahanan di garis depan. Filipina

memiliki basis populasi yang besar, namun tantangan utamanya terletak pada optimalisasi sumber daya manusia agar memiliki kualitas teknis yang setara dengan strandar industri maritim dan militer modern. Melalui kemitraan ini Filipina berupaya mentransformasi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, operasional, dan kepemimpinan bagi personel penjaga pantai dan Angkatan Laut Filipina. Peningkatan keterampilan ini memastikan ketersediaan demografi dapat menjadi tenaga ahli profesional yang memiliki kesiapan tempur serta operasional yang tinggi di laut.

Interaksi yang intens dalam latihan gabungan seperti *Maritime Cooperative Activity* mempercepat adopsi kultur maritim profesioanl serta meningkatkan interoperabilitas antarpersonel kedua negara. Selain aspek militer, dukungan Australia dalam pemeliharaan armada dan peningkatan kapabilitas pengkalan menciptakan permintaan besar terhadap tenaga kerja teknis seperti mekanik, insinyur, dan ahli logistik di sektor pendukung. Ekspansi lapangan kerja di sektor industri maritim ini secara langsung memperluas basis penduduk yang terlibat aktif dalam menopang kekuatan laut nasional. Publikasi luas mengenai patroli bersama tersebut turut membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keamanan maritim, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak warga negara untuk berkarier dan berkontribusi dalam penguatan pilar-pilar kekuatan laut Filipina.

Karakter pemerintah dalam teori *Sea Power* Mahan ditentukan oleh konsistensi eksekutif dalam mengarahkan sumber daya nasional untuk membangun kekuatan laut yang melindungi kepentingan strategis. Filipina memanfaatkan kemitraan dengan Australia untuk memperkuat karakter pemerintahan yang tegas dan berbasis hukum, terutama dalam menghadapi dinamika di Laut Filipina Barat. Aliansi ini mempertegas komitmen Manila terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS, yang memposisikan pemerintah Filipina sebagai aktor yang kredibel dan memiliki landasan prinsipil di kawasan serta mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan pertahanan luar negeri dan ekonomi maritim ke dalam satu arahan kebijakan yang lebih koheren. Implementasi nyata melalui *Maritime Cooperative Activity* (MCA) serta integrasi teknologi pengawasan dari Australia membuktikan bahwa pemerintah Filipina serius dalam membangun kekuatan laut yang substansial, bukan sekedar retorika politik. Sinergi ini juga memicu penguatan koordinasi antar instansi, mulai dari kementerian pertahanan hingga pasukan penjaga pantai, yang memungkinkan karakter pemerintahan yang kooperatif dan adaptif terhadap kompleksitas keamanan kawasan tersebut. Dengan merancang kemitraan ini sebagai komitmen jangka panjang, Manila menunjukkan orientasi kebijakan maritim yang berkelanjutan dan strategis guna menjaga stabilitas kawasan secara konsisten.

Implementasi Kemitraan Strategis : Penguatan Kapasitas Operasional dan Modernisasi Alutsista Filipina.

kemitraan strategis Filipina-Australia secara signifikan memperkuat pertahanan maritim Manila melalui kolaborasi intensif guna menghadapi dinamika ancaman regional yang kompleks. Peningkatan kapasitas ini terlihat nyata pada program *Joint Australian Training Team-Philippines* (JATT-P) 2025, dengan volume kegiatan yang melonjak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Melalui lebih dari 20 program pelatihan strategis–mencakup keberlanjutan maritim hingga operasi kapal kecil–kerja sama ini kian dipertegas oleh keterlibatan 260 personel Angkatan Pertahanan Australia dalam latihan Balikatan 2025 untuk membangun interoperabilitas kawasan.

Filipina meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 21% menjadi 271 miliar PHP pada tahun 2025 dengan alokasi signifikan sebesar 35% khusus untuk Angkatan laut. Keputusan strategis Filipina untuk mengalokasikan 35% anggaran program modernisasi tahap ketiga (*Horizon 3*, 2023-2028) kepada Angkatan Laut menegaskan pergeseran paradigma pertahanan nasional yang kini manjadikan kekuatan maritim sebagai prioritas utama (R. C. De Castro, 2024). Angka ini merepresentasikan porsi investasi terbesar kedua dalam sejarah modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), yang menandai transisi fokus dari operasi darat dan udara dasar menuju penguatan poros pertahanan laut sebagai

pilar kedaulatan negara. Implementasi teknis dari alokasi anggaran tersebut diwujudkan melalui akuisisi platform tempur canggih, termasuk penambahan fregrat kelas Jose Rizal, kapal patroli dengan daya tahan tinggi, hingga rencana pengadan kapal selam pertama Filipina guna memperluas jangkauan operasi laut lepas.

Peningkatan pendanaan domestik ini berjalan selaras dengan intensitas operasi gabungan antara Australia dan Filipina yang frekuensinya melonjak dua kali lipat. Sinergi tersebut menciptakan daya tangkal nyata yang dibuktikan dengan penurunan drastis kehadiran kapal Tiongkok di Second Thomas Shoal dari 46 kapal pada akhir 2023 menjadi rata-rata 14 kapal pada 2025. Peningkatan intensitas latihan maritim serta *Maritime Domain Awareness* (MDA) yang didukung oleh teknologi pengawasan Australia telah memperbesar risiko publikasi negatif dan biaya reputasi bagi Beijing. Kehadiran aset militer Australia di samping kapal Filipina menciptakan tekanan diplomatik yang signifikan, yang memaksa Tiongkok memangkas jumlah kapal militer reguler di permukaan guna menghindari stigmatisasi sebagai agresor di forum internasioal. Dengan demikian, kehadiran fisik patroli bilateral ini secara efektif meningkatkan ambang batas bagi Tiongkok untuk melakukan provokasi militer secara terang-terangan di dekat titik konflik. Namun, pengurangan jumlah kapal militer tersebut tidak mengindikasikan melemahnya determinasi Tiongkok di kawasan tersebut, melainkan pergeseran ke arah strategi zona abu-abu melalui penggunaan kapal penjaga pantai dan milisi maritim.

Australia memberikan dukungan material yang susbtansial untuk memperkuat kesadaran domain maritim (*Maritime Domain Awareness*) Filipina melalui penyerahan peralatan drone senilai 34 juta PHP kepada penjaga pantai Filipina pada April 2025. Dukungan teknis ini diperluas secara finansial melalui investasi kerja sama maritim sipil yang melonjak dua kali lipat menjadi 707 juta PHP untuk periode 2025-2029. Komitmen tersebut kian dipertegsas dalam program *Development Partnership* (DPP) Filipina-Australia, sebuah kerangka kerja strategis pembangunan yang berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif(Elfaki & Ahmed, 2024). Dalam kerangka DPP ini, Australia mengalokasikan dana tahunan lebih dari 4 miliar PHP dengan 3,6 miliar PHP di antaranya merupakan bantuan pambangunan resmi. Besaran alokasi tersebut menempatkan program pengembangan Filipina sebagai prioritas terbesar kelima bagi Australia. Secara strategis, kemitraan jangka panjang kedua negara telah mencatatkan total dukungan lebih dari 63 miliar PHP selama dua dekade terakhir.

Implementasi patroli laut gabungan antara Australia dan Filipina sejak November 2023 memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pengawasan maritim melalui pengerahan kapal perang serta pesawat pengintai. Penguatan ini berlanjut dalam *Maritime Cooperative Activity* (MCA) 2025 dengan melibatkan aset strategis seperti kapal perusak HMAS Sydney dan BRP Antonio Luna. Keterlibatan kedua aset utama ini menuntut sinkronisasi prosedur manuver serta pembagian zona pertahanan udara dan tembakan di bawah satu rencana operasi gabungan yang kompleks. Melalui penggunaan protokol data dan frekuensi terstandar, kedua kapal mampu membangun *Common Operational Picture* (COP) secara *real time*, yang memungkinkan pertukaran identifikasi sasaran dan perintah komando tanpa tumpang tindih. Integrasi sistem ini memungkinkan koordinasi intersepsi kapal asing dan pembagian zona pertahanan dilakukan dengan kecepatan serta akurasi tinggi, melampaui kemampuan koordinasi manual konvensional. Kehadiran kapal-kapal tersebut secara langsung meningkatkan kemampuan respons Filipina terhadap aktivitas provokatif di Laut Filipina Barat.

Meskipun total akumulasi hari pelayaran kapal Penjaga Pantai Tiongkok meningkat hingga 1.939 hari pada 2024, patroli gabungan ini tetap efektif menciptakan daya tangkal sekaligus memperkuat legitimasi kedaulatan Filipina di mata internasional (Putra, 2023). Melalui keputusan permanen Pengadilan Arbitrase 2016 yang membatalkan klaim historis *nine-dash line*, Filipina berhasil memosisikan diri sebagai penjaga hukum laut internasional sekaligus menempatkan setiap tindakan asertif Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap aturan global. Dalam kerangka ini, patroli gabungan dengan mitra strategis seperti Australia dan AS bukan sekadar unjuk kekuatan fisik, melainkan manifestasi operasional dari komitmen

Filipina dalam menegakkan tata tertib berbasis aturan. Kehadiran fisik kapal patroli di wilayah sengketa memperkuat citra Filipina sebagai pemegang hak berdaulat yang bertanggung jawab dan aktif dalam mengendalikan yurisdiksinya secara *de facto*. Aktivitas identifikasi serta dokumentasi terhadap kapal asing yang beroperasi tanpa izin di ZEE Filipina menjadi modal diplomatik krusial untuk membuktikan peran Manila sebagai penegak hukum maritim.

Sinergi tersebut diperkuat melalui pelatihan operator drone bagi 30 personel Penjaga Pantai Filipina guna meningkatkan kemampuan pengawasan *real-time* di Laut Filipina Barat (Trasviña-Moreno et al., 2017). Sebagai *force multiplier*, penggunaan drone memperluas jangkauan pemantauan tanpa harus mengandalkan penambahan kapal fisik yang memakan biaya dan waktu lama. Satu unit kapal patroli kini mampu mengoperasikan wahana udara tak berawak untuk menjangkau area di luar jangkauan radar dasar, sehingga menciptakan sistem pengawasan yang jauh lebih efisien dan kost-efektif di berbagai titik-titik rawan.

Kerja sama strategis ini secara langsung mendukung program modernisasi alutsista Filipina terutama dalam memperkuat proyeksi kekuatan Angkatan Laut melalui akuisisi kapal perang canggih. Fondasi kekuatan tersebut telah terbangun melalui pengoperasian dua fregat rudal kelas Jose Rizal (FF-150 dan FF-151) yang dilengkapi teknologi anti-kapal selam dan anti-pesawat udara sejak 2021. Untuk memperluas daya jangkau tempur, Filipina juga menjadwalkan kedatangan unit pertama dari enam korvet baru kelas *Miguel Malvar Class* (HDC-3100) pada tahun 2025. Upaya modernisasi ini semakin diperkokoh dengan pengadaan enam kapal *Offshore Patrol Vessels* (OPV) yang unit pertamanya telah resmi diluncurkan. Kapal-kapal OPV ini akan dilengkapi dengan sistem meriam utama 76mm dan meriam sekunder 30mm yang memberikan kemampuan pertahanan diri serta interdisi efekti terhadap kapal asing. Selain itu, terdapat dek penerbangan yang mendukung operasional helikopter maritim untuk memperluas jangkauan pengawasan dan misi pencarian di laut lepas. Pengadaan OPV bersama dengan *Miguel Malvar* merupakan prioritas utama dalam fase terakhir program modernisasi militer Filipina, *Horizon 3*–yang dirancang untuk mencipatakan kekuatan laut kredibel dan mandiri. Integrasi aset-aset baru ini secara signifikan memperluas cakupan patroli maritim Filipina di berbagai wilayah perairan strategis.

Pemerintah Filipina menunjukkan komitmen kuat terhadap modernisasi militer melalui peningkatan anggaran pertahanan 2025 sebesar 12,3% menjadi 4,65 miliar USD (284,26 miliar PHP). Langkah ini mencakup alokasi khusus sebesar 800 juta USD (48,91 miliar PHP) untuk memperkuat Angkatan laut sebagai bagian dari program jangka Panjang *Re*-Horizon 3. Inisiatif strategis yang disetujui oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. tersebut menargetkan investasi mencapai 35 miliar USD (2,139 triliun PHP) selama satu dekade ke depan demi menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik (S. Rafal, 2024). Namun ambisi besar ini masih menghadapi tantangan struktural dalam implementasi anggaran karena dari 75 miliar PHP yang direncanakan untuk modernisasi di tahun 2025, hanya 35 miliar PHP yang merupakan pendanaan terjamin. Sisa alokasi sebesar 40 miliar PHP masih berstatus cadangan yang sangat bergantung pada kelebihan penerimaan negara (Amador III & Baladjay, 2020).

Latihan gabungan yang kompleks seperti *Maritime Cooperative Activity* (MCA) menuntut kepastian Manila dalam menyediakan aset modern yang memenuhi standar interoperabilitas Australia secara konsisten. Namun, skema anggaran 2025 yang menempatkan 40 miliar PHP dalam kategori cadangan menciptakan risiko operasional bagi Canberra. Ketidakpastian jadwal operasional kapal korvet dan OPV baru tersebut memaksa militer Australia mengevaluasi kembali alokasi aset premium mereka, seperti kapal perusak HMAS Sydney atau pesawat P-8A, guna menghindari *opportunity cost* yang tinggi akibat keterlambatan kapasitas dari pihak Filipina. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi derajat kepercayaan strategis Australia terhadap kredibilitas Filipina sebagai pilar keamanan di Indo-Pasifik. Ketergantungan kronis pada cadangan fiskal dan pinjaman luar negeri memperlihatkan kerentanan domestik yang membuat Canberra cenderung

mengadopsi pendekatan latihan yang lebih bertahap atau bersifat swadaya terbatas. Ketidakpastian pendanaan aktual tersebut berpotensi menghambat laju penguatan militer sekaligus menjadi kendala kritis dalam merespons dinamika geopolitik kawasan secara tepat.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui JATT-P menjadi fondasi penting bagi efektivitas operasional berbagai alutsista baru yang diakuisisi oleh Filipina. Penguasaan teknis terhadap materi perencanaan gabungan dan analisis intelijen secara langsung mendukung personel dalam mengoperasikan teknologi canggih pada fregat kelas Jose Rizal serta korvet HDC-3100. Sinergi antara keahlian personel dan kecanggihan perangkat keras ini memastikan bahwa setiap aset tempur dapa berfungsi secara optimal dalam setiap pertahanan maritim yang terintegrasi. Selain itu, pelatihan logistik dan keamanan siber yang diberikan Australia memberikan jaminan keberlanjutan operasional bagi armada laut Filipina di wilayah perairan strategis. Pelatihan logistik dan keamanan siber antara Filipina dan Australia berfokus pada penyelarasan prosedur operasi standar (SOP) untuk menghilangkan hambatan teknis saat beroperasi sebagai satu kesatuan taktis. Dalam aspek logistik, harmonisasi protokol rantai pasokan, pemeliharaan alutsista, dan manajemen amunisi memastikan dukungan antar-pangkalan dapat diproses secara seragam tanpa kendala administratif yang rumit. Efisiensi ini memungkinkan kedua negara bergerak lebih cepat dalam latihan jangka panjang seperti *Maritime Cooperative Activity* (MCA) karena kesamaan standar keselamatan dan audit lapangan. Sinkronisasi tersebut diperluas ke lapisan informasi melalui penyamaan protokol keamanan jaringan, standar kriptografi, dan prosedur tanggap insiden siber guna melindungi integrasi data taktis. Penggunaan indikator keamanan yang pararel menjamin setiap ancaman pada sistem komando dapat dikomunikasikan secara presisi, sehingga integrasi informasi tetap kokoh dan terhindar dari titik lemah saat operasi gabungan berlangsung. Pada akhirnya, sinkronisasi antara investasi SDM dan modernisasi alutsista memperkuat posisi Filipina sebagai mitra keamanan yang kredibel dan memiliki kesiapan tempur tinggi di kawasan.

Program ini secara strategis melibatkan ratusan personel Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) serta perwakilan Departemen Pertahanan Nasional, yang mencerminkan terciptanya integrasi pelatihan lintas lembaga dalam sistem pertahanan nasional. Efektivitas kolaborasi ini diperkuat oleh kerangka *Enhanced Defence Cooperation Program* (E-DCP) serta kesepakatan logistik dan industri pertahanan yang diformalkan pada tahun 2022 (R. De Castro, 2014). Ratifikasi dan pemberlakuan penuh *Mutual Logistic Support Arrangement* (MLSA) memberikan kerangka hukum mengikat bagi pertukaran dukungan logistik antara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Angkatan Pertahanan Australia (ADF). Kesepakatan ini melegitimasi secara formal distribusi pasokan bahan bakar, makanan, amunisi, hingga layanan evakuasi medis dan pemeliharaan selama operasi gabungan maupun situasi darurat. Dengan adanya payung hukum MLSA, seluruh arus logistik militer diakui sebagai bagian dari operasi kooperatif yang sah menurut hukum internasional, sehingga meminimalisir risiko ketegangan politik akibat aktivitas sepihak.

Secara operasional, standar logistik yang terpadu meningkatkan efisiensi koordinasi dengan mempercepat mobilisasi aset udara dan laut antar-pangkalan kedua negara. Dalam konteks krisis di Laut Filipina Barat, MLSA memungkinkan armada Filipina mengandalkan kapasitas Australia untuk pengisian bahan bakar dan penyimpanan amunisi tanpa harus meninggalkan area operasi untuk kembali ke pesisir. Standarisasi ini memangkas waktu respons kritis dan memastikan keberlanjutan misi maritim jangka panjang melalui mekanisme pendukung yang lebih terstruktur. Kolaborasi ini telah membuahkan hasil nyata berupa standarisasi prosedur operasi militer, transfer teknologi maritim, hingga penguatan sistem komando dan kendali. Lebih jauh lagi, cakupan kerja sama ini meluas melampaui aspek teknis dengan mencakup tantangan kontemporer seperti kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan, penggulangan bencana, hingga pengarusutamaan isu gender dan perdamaian dalam kebijakan pertahanan. Melalui pendekatan multidimensi yang komprehensif ini, kemitraan strategis Filipina-Australia tidak hanya meningkatkan kapabilitas personel secara individu,

tetapi juga secara nyata mendorong profesionalisme dan akselerasi modernisasi dalam seluruh struktur pertahanan nasional Filipina.

Latihan ini mencakup berbagai skenario operasional yang kompleks mulai dari pertahanan udara terintegrasi, penanggulangan pendaratan musuh (*counter-landing*), dukungan logistik, medis, dan serangan maritim dalam kerangka koordinasi multinasional. Salah satu komponen krusialnya adalah uji coba tembakan langsung (*live-fire exercise*) di Pulau Palawan yang melibatkan sistem persenjataan canggih seperti peluncur roket HIMARS dan rudal anti-tank Javelin. Uji coba ini berfungsi untuk mensimulasikan penghancuran target musuh yang mencoba melakukan pendaratan di garis pantai strategis Filipina. Kehadiran koalisi internasional tersebut memberikan legitimasi hukum dan politik bagi posisi Manila sekaligus mempertegas solidaritas regional bersama Jepang dan AS di Indo-Pasifik. Evolusi kekuatan militer Filipina semakin terlihat melalui peningkatan kompleksitas dalam Latihan Alon 2025 yang berfokus pada operasi amfibi skala besar. Momentum tersebut diperkuat oleh partisipasi perdana Angkatan Bersenjata Filipina dalam *Talisman Sabre* 2025 sebagai bentuk integrasi mendalam ke dalam arsitektur keamanan regional yang didukung oleh Australia.

Tantangan Geopolitik dan Prospek Keberlanjutan Kerja Sama Filipina-Australia

Meskipun penguatan kapasitas militer dan modernisasi alutsista menujukkan kemajuan yang pesat, keberlajutan kemitraan strategis Filipina-Australia tetap dibayangi oleh dinamika geopolitik yang fluktuatif di kawasan Indo-Pasifik. Tantangan utama muncul dari tekanan asimetris Tiongkok di Laut Filipina Barat yang terus menguji ketahanan operasional kedua negara melalui taktik zona abu-abu (*grey zone tactics*). Selain faktor eksternal, prospek kerja sama ini juga sangat bergantung pada konsistensi politik domestik di Manila terutama dalam menjaga stabilitas pendanaan serta komitmen terhadap aliansi jangka panjang. Keberhasilan dalam menavigasi hambatan struktural dan tekanan regional tersebut pada akhirnya akan menentukan apakah kemitraan ini mampu bertransformasi menjadi pilar keamanan permanen atau sekadar respons situasional terhadap krisis yang sedang berlangsung.

Meskipun modernisasi pertahanan Filipina menunjukkan kemajuan, ketimpangan kapabilitas tetap terlihat mencolok dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah dan modernitas armada. Saat ini Angkatan Laut Tiongkok mengoperasikan 121 kapal perang permukaan, 56 kapal selam, dan 341 kapal patroli, sementara Filipina baru memiliki dua fregat operasional dengan kapasitas terbatas. Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad mengakui bahwa disparitas tersebut tetap lebar walaupun kesiapan kapal induk Tiongkok masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, Filipina menghadapi tantangan struktural serius dalam *Maritime Domain Awareness* (MDA) karena kapasitas pemantauan saat ini dinilai belum memadai untuk mencakup wilayah strategis yang sangat luas. Walaupun Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah berupaya meningkatkan patroli reguler dan pemantauan jalur udara di *Air Defense Identification Zone*, kemampuan tersebut masih jauh dari ideal untuk mengamankan kedaulatan di Laut Filipina Barat.

Ketidakseimbangan kekuatan ini memaksa Filipina bergantung pada dukungan eksternal dari mitra strategis seperti AS dan Australia yang kemudian memicu dilema geopolitik. Filipina menjalankan strategi lindungi nilai (*Hedging*) yang sangat cermat antara ketergantungan keamanan pada Barat dan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama (Han et al., 2023). Melalui pendekatan ini, Filipina tidak berpihak secara eksklusif, melainkan menggabungkan keterlibatan politik dan pembangunan kapablitas pertahanan dengan beberapa aktor demi meminimalkan risiko strategis. Dalam penerapannya, Manila memperkuat aliansi dan latihan militer bersama AS, Australia, serta Jepang untuk meningkatkan daya tawar di wilayah Laut Filipina Barat (R. C. De Castro, 2018). Pada saat yang sama, pemerintah Filipina tetap mempertahankan volume perdagangan dan investasi yang tinggi dengan Tiongkok sebagai mitra dagang

terbesarnya (Clemente, 2016). Langkah ganda tersebut menunjukkan bahwa Filipina tidak sepenuhnya memihak untuk melawan Tiongkok, namun juga tidak mengabaikan ancaman militer di laut.

Oleh karena itu, penguatan kekuatan laut Filipina tidak hanya menuntut peningkatan kapasitas fisik tetapi juga memerlukan ketajaman diplomasi serta manajemen aliansi yang terukur. Eskalasi militer di Laut Filipina Barat berpotensi besar mengganggu jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah tersebut, terutama arus impor energi, barang modal, dan komoditas ekspor nasional yang sangat bergantung pada konektivitas laut global. Ketegangan operasional armada, intensitas latihan militer skala besar, hingga risiko bentrokan fisik di laut dapat meningkatkan biaya asuransi kapal dan memaksa perubahan rute pelayaran menjadi titik efisien. Dampak berantai ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan tekanan berat pada sektor maritim domestik Filipina. Dalam konteks dilematis ini, modernisasi alutsista memang mendesak untuk memperkuat kedaulatan wilayah, namun diplomasi tetap menjadi instrumen utama pertahanan. Melalui jalur diplomasi, Filipina dapat mengamankan kepentingannya di tengah persaingan ketat AS dan Tiongkok serta memperkuat penegakan hukum berbasis aturan internasional seperti UNCLOS 1982 guna menjamin kebebasan navigasi dagang. Langkah komunikasi formal ini juga penting untuk mencegah salah paham taktis di lapangan, sebab modernisasi militer tanpa saluran komunikasi yang jelas justru rentan memicu ketegangan baru. Dengan demikian, kombinasi yang seimbang antara peningkatan kekuatan alutsista dan ketajaman diplomasi menjadi kunci utama bagi Manila dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi di kawasan Laut Filipina Barat.

Kemitraan keamanan Filipina dengan Australia umumnya dipandang lebih aman secara politik dibandingkan aliansi utamanya dengan AS. Posisi Australia sebagai kekuatan regional tidak terlalu terkait langsung dengan episentrum rivalitas asimetris antara AS dan Tiongkok. Kondisi ini membuat kerja sama militer Manila bersama Canberra lebih mudah dipresentasikan sebagai bentuk kolaborasi keamanan kawasan daripada sebuah konfrontasi terbuka terhadap Tiongkok. Selain itu, status Australia yang bukan merupakan negara adidaya membuat kemitraan ini memiliki risiko politik yang lebih rendah dalam memicu reaksi keras dari Tiongkok. Sebaliknya, ketergantungan militer Filipina yang terlalu terbuka pada AS melalui pemanfaatan pangkalan udara dan latihan skala besar dinilai sangat sensitif bagi Beijing karena dianggap sebagai strategi pembendungan (*containment*) di Indo-Pasifik. Dengan demikian, Filipina dapat memanfaatkan hubungannya dengan Australia sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat pertahanan maritim tanpa memicu eskalasi politik yang ekstrem. Pendekatan ini pada akhirnya menempatkan kemitraan strategis Filipina-Australia sebagai pilar yang sangat kompatibel dalam mendukung keberhasilan strategi lindung nilai (*hedging*) terhadap Tiongkok.

Kehadiran Australia dalam patroli maritim gabungan tidak hanya memperkuat legitimasi internasional Filipina dalam menghadapi klaim sepihak Tiongkok tetapi juga mengirimkan pesan tegas mengenai komitmen bersama terhadap kebebasan navigasi dunia. Secara yurisdiksi, posisi Australia sangat strategis sebagai bagian dari kelompok elit mitra keamanan yang memiliki kesepakatan *Status of Visiting Forces Agreement* (SOVFA) dengan Filipina. Landasan hukum formal ini memfasilitasi kerja sama pertahanan yang lebih intensif sekaligus menjadi sinyal diplomatik yang kuat bagi Tiongkok. Kolaborasi tersebut kian nyata melalui partisipasi aktif dalam Latihan Balikatan serta keikutsertaan perdana militer Filipina dalam Latihan Talisman Sabre 2025. keterlibatan dalam manuver berstandar tinggi tersebut menegaskan posisi Filipina sebagai bagian integral dari arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang didukung oleh aliansi negara-negara demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis Filipina dan Australia memiliki peran penting dalam memperkuat pertahanan maritim Filipina di Laut Filipina Barat melalui peningkatan interoperabilitas, modernisasi alutsista, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi program Joint Australian Training Team-Philippines (JATT-P), Maritime Cooperative Activity (MCA), dan dukungan terhadap Maritime Domain Awareness (MDA) terbukti meningkatkan kesiapan operasional Angkatan Bersenjata Filipina dalam menghadapi tekanan maritim Tiongkok di kawasan sengketa seperti Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa teori Sea Power Alfred Thayer Mahan masih relevan dalam menjelaskan pentingnya penguasaan ruang laut, posisi geografis, kapasitas armada, dan kemitraan strategis sebagai instrumen menjaga kedaulatan maritim. Selain meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman eksternal, kerja sama Filipina-Australia turut memperkuat legitimasi diplomatik Manila dalam menegakkan hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS dan putusan arbitrase 2016.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif efektivitas operasional kerja sama pertahanan tersebut terhadap perubahan keseimbangan kekuatan di Laut Filipina Barat. Selain itu, dinamika kebijakan domestik Filipina dan perubahan geopolitik Indo-Pasifik yang sangat cepat dapat memengaruhi keberlanjutan kemitraan strategis ini di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran dengan analisis data lapangan, wawancara strategis, maupun evaluasi kebijakan pertahanan secara komparatif dengan negara lain di Asia Tenggara. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan pertahanan maritim Filipina perlu terus diimbangi dengan diplomasi aktif, konsistensi pendanaan modernisasi militer, serta pengembangan kerja sama regional yang adaptif agar stabilitas keamanan dan kepentingan ekonomi di Laut Filipina Barat tetap terjaga secara berkelanjutan.

REFERENSI

Amador III, J., & Baladjay, D. M. (2020). Modernizing or Equalizing? Defense Budget and Military Modernization in the Philippines, 2010 – 2020. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3756116

Andriyanto, K. E., Rodon Pedrason, Anak Agung Banyu Perwita, & Oktaheroe Ramsi. (2024). The Philippines - United States - Japan - Australia Defense Diplomacy through "The Squad" : Actor, Process, and Issue. *International Journal of Applied and Advanced Multidisciplinary Research*, *2*(11), 811–822. https://doi.org/10.59890/ijaamr.v2i11.59

Antonopoulos, C. (2020). Maritime Geographies. In *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 397–406). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10670-5

Asia Maritime Transparency Initiative. (2023, March). *South China Sea Energy Exploration and Development*. Center for Strategic and International Studies. https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/

AZARI, M. A. N., CHANDRAN, S. D., & MAHAMAD AZIZ, F. M. (2023). DISPUTES IN THE SOUTH CHINA SEA AND THE ROLE OF CHINA AND ASEAN IN CONFLICT RESOLUTION. *JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL DEVELOPMENT*, *11*(1), 38–45. https://doi.org/10.46754/jbsd.2023.03.004

Batongbacal, J. (2015, January). *Arbitration 101: Philippines v. China*. Center For Strategic & International Studies. https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/

Baylon, A., & Santos, E. (2023). Maritime Security Initiatives at Maap: Implications for a Ched-Funded Partnership with the University of Wollongong Australia. *Pedagogika-Pedagogy*, *95*(6s), 56–63. https://doi.org/10.53656/ped2023-6s.06

Brewster, D. (2018). Give light, and the darkness will disappear: Australia's quest for maritime domain awareness in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, *14*(3), 296–314. https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1517437

Britannica, T. E. of E. (2026). *Scarborough Shoal*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Scarborough-Shoal#ref428798

Campbell, C., & Salidjanova, N. (2016). *South China Sea arbitration ruling: What happened and what's next? [Issue Brief]*. https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Issue%20Brief_South%20China%20Sea%20Arbitration%20Ruling%20What%20Happened%20and%20What%27s%20Next071216.pdf

Catherine A. Courtney, A. T. W. (2000). Integrated Coastal Management in the Philippines: Testing New Paradigms. *Coastal Management*, *28*(1), 39–53. https://doi.org/10.1080/089207500263639

Clemente, T. (2016). Understanding the Economic Diplomacy between the Philippines and China. *International Journal of China Studies*, *7*, 215.

Council on Foreign Relations. (2024, September 17). *Territorial disputes in the South China Sea*. Global Conflict Tracker. https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea

De Castro, R. (2014). The 21st Century Philippine-U.S. Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA): The Philippines` Policy in Facilitating the Obama Administration`s Strategic Pivot to Asia. *Korean Journal of Defense Analysis*, *26*, 427–446.

De Castro, R. C. (2018). Fostering Military Diplomacy with America's Bilateral Allies: The Philippine Policy of Linking Spokes Together. In *International Security in the Asia-Pacific* (pp. 219–254). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60762-7_10

De Castro, R. C. (2024). Exploring the Philippines' Evolving Grand Strategy in the Face of China's Maritime Expansion: From the Aquino Administration to the Marcos Administration. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *43*(1), 94–119. https://doi.org/10.1177/18681034241234670

De Castro, R. C. (2025). Examining Philippine defense policy from the Aquino to the Marcos Administration: Determining the patterns and goals of 21st century Philippine strategic culture. *Asian Affairs: An American Review*, *52*(4), 174–198. https://doi.org/10.1080/00927678.2025.2570074

Elfaki, K. E., & Ahmed, E. M. (2024). Digital technology adoption and globalization innovation implications on Asian Pacific green sustainable economic growth. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *10*(1), 100221. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100221

Gill, D. M. (2025). From Ayungin to Escoda: lessons for Manila's sea denial quest in the West Philippine Sea. *Australian Journal of International Affairs*, *79*(5), 797–803. https://doi.org/10.1080/10357718.2025.2482711

Han, Z., Jiang, K., Peng, F., & Li, S. (2023). The Philippines' hedging strategy against China in the South China Sea dispute: Based on the human-ocean regional system. *Marine Policy*, *151*, 105578. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105578

Heriawan. (2022). The Ever-growing China's Maritime Rise and South China Sea Dispute: A Literature Review. *Jurnal Hubungan Internasional*, *15*(1), 74–92. https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33644

Liu, X. (2026, March 23). *Divergence and tacit understanding in the China–Philippines provisional arrangement at Second Thomas Shoal*. Asia Maritime Transparency Initiative. https://amti.csis.org/divergence-and-tacit-understanding-in-the-china-philippines-provisional-arrangement-at-second-thomas-shoal/

Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Little, Brown, and Company.

Permanent Court of Arbitration, (n.d.). (n.d.). *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China) (Case No. 2013-19)*. PCA-CPA. Retrieved April 26, 2026, from https://pca-cpa.org/cn/cases/7/

Philippines, O. of the P. (2012). *Administrative Order No. 29, s. 2012: Naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines, and for other purposes.* https://faolex.fao.org/docs/pdf/phi152482.pdf

Putra, B. A. (2023). The Golden Age of White Hulls: Deciphering the Philippines' Maritime Diplomatic Strategies in the South China Sea. *Social Sciences*, *12*(6), 337. https://doi.org/10.3390/socsci12060337

Rodger, N. A. M. (1998). Sea-Power and Empire, 1688–1793. In *The Oxford History of the British Empire: Volume II: The Eighteenth Century* (pp. 169–183). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198205630.003.0008

S. Rafal, A. (2024). Maritime Security and the Protection of Philippine Territorial Waters. *APJAET - Journal Asia Pacific Journal of Advanced Education and Technology*, *3*(3). https://doi.org/10.54476/apjaet/44864

Stach, L. (2021a). The Philippines maritime forces and its maritime military power projection capabilities: unfulfilled ambitions? *Defense & Security Analysis*, *37*(4), 414–434. https://doi.org/10.1080/14751798.2021.1996096

Stach, L. (2021b). The Philippines maritime forces and its maritime military power projection capabilities: unfulfilled ambitions? *Defense & Security Analysis*, *37*(4), 414–434. https://doi.org/10.1080/14751798.2021.1996096

Tierney John, J. , J. (2022, October 5). *Maritime power*. The Institute of World Politics. https://www.iwp.edu/articles/2022/10/05/maritime-power/

Trasviña-Moreno, C., Blasco, R., Marco, Á., Casas, R., & Trasviña-Castro, A. (2017). Unmanned Aerial Vehicle Based Wireless Sensor Network for Marine-Coastal Environment Monitoring. *Sensors*, *17*(3), 460. https://doi.org/10.3390/s17030460

Vargas-Suárez, R. A., Cuervo-Vázquez, N., & Moloeznik-Gruer, M. P. (2021). Propuesta de un modelo de medición del poder marítimo de las naciones. *Revista Científica General José María Córdova*, *19*(34), 267–306. https://doi.org/10.21830/19006586.759